



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI DENGAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN RI DAN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI**

| | |
|------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2014 -2015 |
| Masa Persidangan | : I |
| Jenis Rapat | : Rapat Kerja |
| Dengan | : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari, Tanggal | : Senin, 1 September 2014 |
| Pukul | : 10.00 WIB s.d 13.00 WIB |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI |
| Ketua | : Ir. S. Milton Pakpahan, MM |
| Sekretaris | : Dr. Dewi Barliana Soetisna, M.Psi |
| Hadir Anggota | : 31 dari 49 Anggota Komisi VII DPR-RI orang izin |
| Hadir Pemerintah | : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Sekjen ESDM, dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI beserta jajarannya. |
| Acara | : " Pelaksanaan Fungsi Pengawasan." Perkembangan Renegoisasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). |

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VII DPR RI pada Hari Senin, tanggal 1 September 2014 dibuka pukul 11.20 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Ir. S. Milton Pakpahan, MM dan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI terkait pokok bahasan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan, Perkembangan Renegoisasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

II. KESIMPULAN

1. Komisi VII DPR RI mengapresiasi hasil renegoisasi yang telah dicapai oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

2. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI untuk melaporkan 10 (sepuluh) perusahaan Kontrak Karya (KK) dan 33 (tiga puluh tiga) perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang sudah menandatangani MoU. Selanjutnya untuk 24 (dua puluh empat) perusahaan KK dan 40 (empat puluh) perusahaan PKP2B yang masih proses finalisasi MoU dilaporkan kepada Komisi VII DPR RI sebelum berakhirnya Masa Bhakti Anggota DPR RI Periode 2009-2014 (akhir September 2014).
3. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI untuk menyampaikan kepada Komisi VII DPR RI secara detil 6 (enam) isu strategis hasil renegosiasi 34 (tiga puluh empat) perusahaan KK dan 73 (tujuh puluh tiga) perusahaan PKP2B (kondisi existing sebelum renegosiasi, hasil renegosiasi, peraturan perundangan), yakni;
 - a. Rencana Wilayah Pencadangan Negara (WPN) untuk mendapat persetujuan DPR RI sesuai amanat Pasal 27 dan 28 UU No. 4 Tahun 2009.
 - b. Progres secara komprehensif peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian mineral dan/atau batubara di dalam negeri sesuai amanat Pasal 102, 103 dan 104 UU No. 4 Tahun 2009.
 - c. Potensi pendapatan negara dan daerah sesuai amanat Pasal 128, 129, 130, 131, 132 dan 133 UU No. 4 Tahun 2009.
 - d. Proyeksi mengutamakan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai amanat Pasal 106 UU No. 4 Tahun 2009.
 - e. Progres divestasi saham sesuai amanat Pasal 112 UU No. 4 Tahun 2009.
 - f. Perubahan KK dan PKP2B menjadi IUPK sesuai amanat Pasal 169 UU No. 4 Tahun 2009.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 13.00 WIB

Jakarta, 1 September 2014

**PIMPINAN KOMISI VII DPR-RI
KETUA,**



Ir. S. MILTON PAKPAHAN, MM